

Pendampingan Rencana Pendirian BUMDes di Desa Tegalrejo Kabupaten Boyolali: Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Partisipasi dan Kesejahteraan Ekonomi Desa

Sarjiyanto Sarjiyanto^{1a*}, Sarwoto Sarwoto^{2a}, Joko Suyono^{2a}, Sinto Sunaryo^{2a}, Lilik Wahyudi^{2a},
Atmaji Atmaji^{2a}, Ana Shohibul Manshur Al Ahmad^{1a}, Dila Maghrifani^{2a}, Wulan Permatasari^{2a},
Risgiyanti Risgiyanti^{2a}

¹Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret,

²Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret,

³Riset Grup Kearifan Lokal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

*E-mail : masyanto@staff.uns.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang melatarbelakangi kegiatan pengabdian ini adalah rendahnya keswadayaan masyarakat dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui perencanaan pendirian BUMDes di Desa Tegalrejo Sawit Boyolali. Sasaran dan tujuan pengabdian adalah peningkatan partisipasi masyarakat, dan peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan dan kewsadayaan masyarakat desa. Berdasarkan studi awal, terdapat 3 (tiga) permasalahan utama yang dihadapi oleh Mitra (Pemdes Tegalrejo); 1. Masih rendahnya kesadaran partisipasi dan keswadayaan masyarakat terlibat dalam pembangunan desa., 2. Penguasaan keterampilan organisasi yang berbasis masyarakat dan berorientasi bisnis bagi masyarakat Tegalrejo masih perlu di tingkatkan., 3. Pengetahuan tata cara dan mekanisme pembentukan BUMDes belum sepenuhnya dipahami oleh perangkat kelembagaan Desa, Tim Metodologi pengabdian telah merancang 3 (tiga) strategi solusi yang akan diimplementasikan dalam permasalahan; 1. Menciptakan kesadaran akan pentingnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat (konsep Community Driven Development) melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan Desa Mitra, 2. Melakukan pendampingan tata cara pembentukan rintisan BUMDes dari proses sosialisasi massa, pembuatan aturan bersama, hingga legalitas BUMDes, 3. Memberikan bantuan fasilitasi untuk legalitas hukum akta notaris pendirian BUMDes, Dokumen AD/ART BUMDes dan Dokumen Rencana Bisnis Strategis BUMDes. Hasil Pengabdian ini adalah munculnya keswadayaan masyarakat dalam mengelola potensi desa melalui usaha Bersama dalam kelembagaan BUMDes.

Kata Kunci : keswadayaan masyarakat; pembangunan ekonomi lokal; partisipasi masyarakat; BUMDes

Abstract

The problem underlying this community service activity is the low level of community self-reliance in the process of developing the community's economy through planning the establishment of BUMDes in Tegalrejo Sawit Village, Boyolali. The target and objective of the service are to increase community participation and the role of BUMDes in increasing income and community self-reliance in the village. Based on the initial study, there are 3 (three) main problems faced by Mitra (Tegalrejo Village Government); 1. The low level of awareness of community participation and self-reliance in village development, 2. The mastery of community-based and business-oriented organizational skills for the Tegalrejo community still needs to be improved 3. Knowledge of the procedures and mechanisms for establishing BUMDes has not been fully understood by the Village institutional apparatus. the Community Service Methodology Team has designed 3 (three) solution strategies that will be implemented in the problem: 1. Creating awareness of the importance of community participation and self-reliance (Community Driven Development concept) through socialization and training to increase the capacity of the community and institutional Village Partners, 2. Assisting with the procedures for establishing BUMDes pilots from the mass socialization process, making joint rules, to the legality of BUMDes, 3. Providing facilitation assistance for the legality of the notarial deed of establishment of BUMDes, BUMDes AD/ART Documents, and BUMDes Strategic Business Plan Documents. The result of this Community Service is the emergence of community self-reliance in

managing the village's potential through joint efforts in BUMDes institutions.

Keywords: *community self-reliance; local economic development; community participation; BUMDes*

1. PENDAHULUAN

Desa Tegalrejo terletak di Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, dengan luas wilayah 1.395.075 hektar. Desa ini terdiri dari beberapa dusun dan berbatasan dengan desa-desa lain di sekitarnya. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, Desa Tegalrejo belum memiliki BUMDes yang dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal. Berdasarkan analisis situasi kondisi Desa Tegalrejo sampai saat ini belum memiliki BUMDes, sebagai bentuk lembaga ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sejalan dengan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 otonomi desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menata/mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa, pemerintah desa dapat mendirikan lembaga ekonomi desa yang disebut BUMDes. BUMDes menjadi pusat perekonomian masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan ekonomi lokal. Keberadaan BUMDes adalah untuk memperkuat ekonomi rakyat desa [1].

BUMDes dibentuk dalam rangka mensukseskan program dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan [2]. Dengan berdirinya BUMDes di Desa Tegalrejo, maka fokus dari pemanfaatan dana desa tidak lagi pada pembangunan sarana dan prasarana desa namun lebih pada pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dan atas prakarsa dari masyarakat desa sehingga pembentukan BUMDes berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa [3]. Sebagai lembaga baru di desa, pengelolaan BUMDes tidak hanya sebagai lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan profit akan tetapi sebagai lembaga *non-profit* yang bertugas untuk memberdayakan masyarakat desa [4]. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi produktif [5]. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan akhir dari pembentukan BUMDes adalah mewujudkan desa mandiri atau desa otonom. Desa mandiri dapat terwujud melalui kerjasama yang dilakukan oleh seluruh unsur yang ada di desa termasuk partisipasi dari masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan desa mandiri. Dalam pengembangan desa mandiri, BUMDes bertindak sebagai fasilitator [6]. Dengan artian bahwa, BUMDes menjadi wadah bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa. Melalui partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan BUMDes akan meningkatkan perekonomian

masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk dari kemandirian desa karena menjadi salah satu indikator dari desa mandiri. Faktor pendukung terbentuknya BUMDes di Desa Tegalrejo meliputi motivasi masyarakat, semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi, dukungan masyarakat akan adanya program, ketidak apatisan masyarakat terhadap program dan kesesuaian program terhadap kondisi riil di masyarakat. Fenomena kemiskinan yang terjadi di perkotaan dan pedesaan ini membutuhkan intervensi pemberdayaan [7]. Tujuan pemberdayaan tersebut adalah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, kesejahteraan dan keseimbangan di dalam banyak segi kehidupan baik lingkungan fisik maupun sosial [8]. Sehingga untuk membangun kesadaran masyarakat Desa Tegalrejo, perlunya pelibatan atau partisipasi dalam pembangunan desa.

Menurut [9][10] partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi [11] dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan dan memecahkan masalahnya [12].

Tabel 1. Matrik metodologi, target atas permasalahan dan solusi kegiatan pengabdian

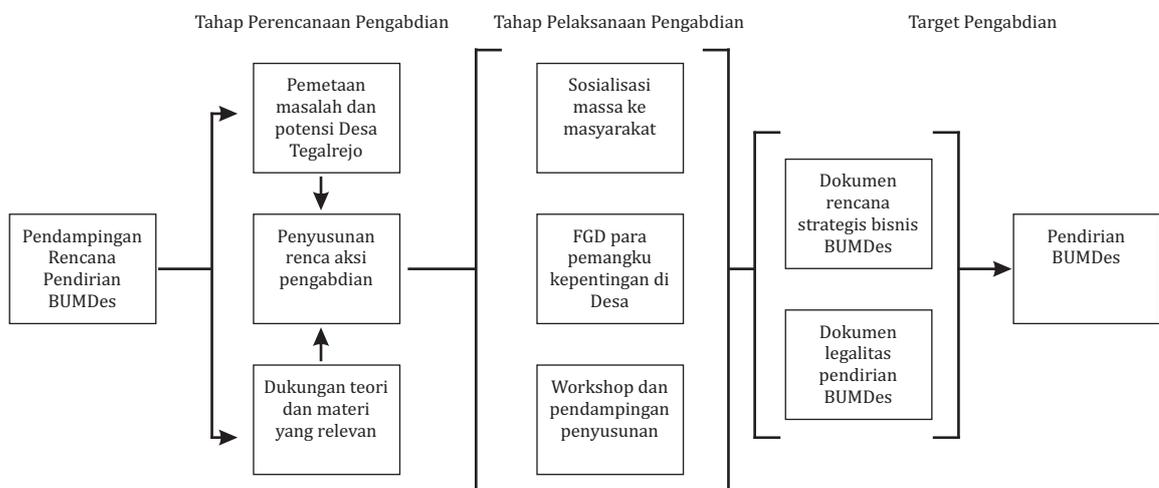
Masalah	Solusi	Target/indicator ketercapaian	Metode PKM
Tingkat partisipasi masyarakat dalam agenda pembangunan desa masih rendah	Sosialisasi <i>Community Development Community Empowerment</i> , partisipasi masyarakat	tentang 1. Minimal 80% Tokoh Masyarakat <i>Driven and sosialisasi dan sosialisasi</i> 2. Peserta <i>Community Development</i> bagi <i>Community Empowerment</i> , peran saing	1) Daftar hadir/presensi 2)Instrumen umpan balik/penilaian peserta
Belum ada Program dari Pemerintah Desa untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Desa dan Lembaga Peremberdayaan Masyarakat Desa	partisipasi masyarakat peningkatan ekonomi dan daya saing daerah	bagi <i>Community Empowerment</i> , peran partisipasi masyarakat bagi peningkatan ekonomi dan daya saing daerah	<i>Driven and</i>
Desa Tegalrejo, walaupun punya potensi kolektif tinggi, Kampung Lele, tetapi sampai saat ini belum memiliki BUMDes	Pendampingan Pembentukan BUMDes	Minimal tersusunnya draf Dokumen Persyaratan Pendirian BUMDes	Dokumen berupa draf AD/ART. SK, Perdes, dll

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kaji-tindak yang merupakan suatu bentuk riset yang memperdayakan masyarakat [13]. Menurut [9], dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya. Dalam kegiatan ini akan diterapkan beberapa metode yang sesuai untuk mencapai tujuan, yakni membuka mindset masyarakat Desa Tegalrejo, Sawit-Boyolali, memunculkan ide kreatif berbasis kearifan lokal, pemberian pelatihan penguatan peran partisipatif masyarakat melalui pendirian BUMDes. Secara ringkas metodologi, target/indikator keberhasilan program atas permasalahan dan solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini secara matrik tergambar pada Tabel 1.

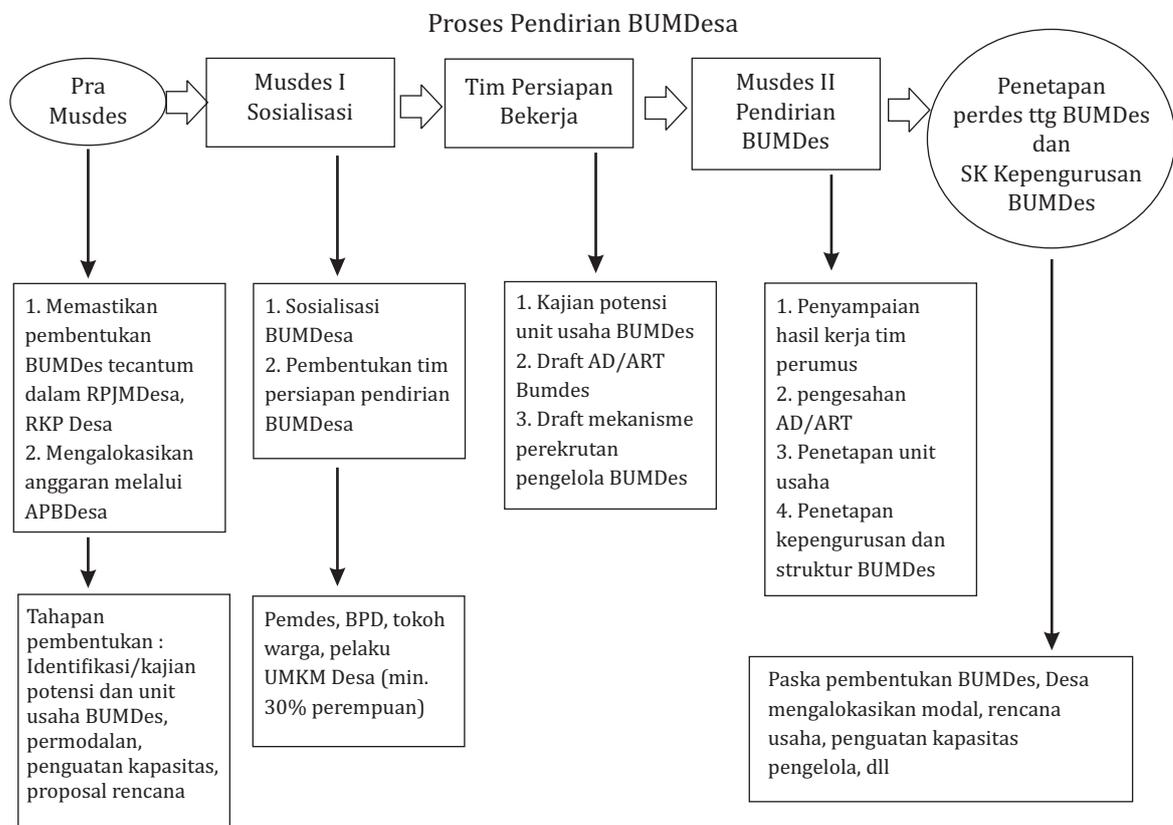
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui tiga (3) tahapan (Gambar 1); tahap pertama adalah perencanaan kegiatan dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan melibatkan Tim Internal Pengabdian Riset Grup Kearifan Lokal FEB Universitas Sebelas Maret. Setelah tahap perencanaan telah disusun secara detail setiap agenda dan penanggung jawabnya, Maka selanjutnya tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dijalankan melalui tiga kegiatan utama; Identifikasi permasalahan, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FDG) antar pemangku kepentingan dan fasilitasi *workshop* dan pendampingan oleh Tim Pengabdian dari RG Kearifan Lokal FEB UNS. Tahap ketiga adalah target yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat, yaitu terciptanya kesadaran masyarakat pentingnya kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes. Tentunya target ini, merupakan target jangka panjang. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat pada tahap awal ini, setidaknya telah membantu menyusun dokumen Renstra Bisnis BUMDes dan Dokumen Legalitas pendirian BUMDes. Gambaran tahapan pengabdian seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan pengabdian

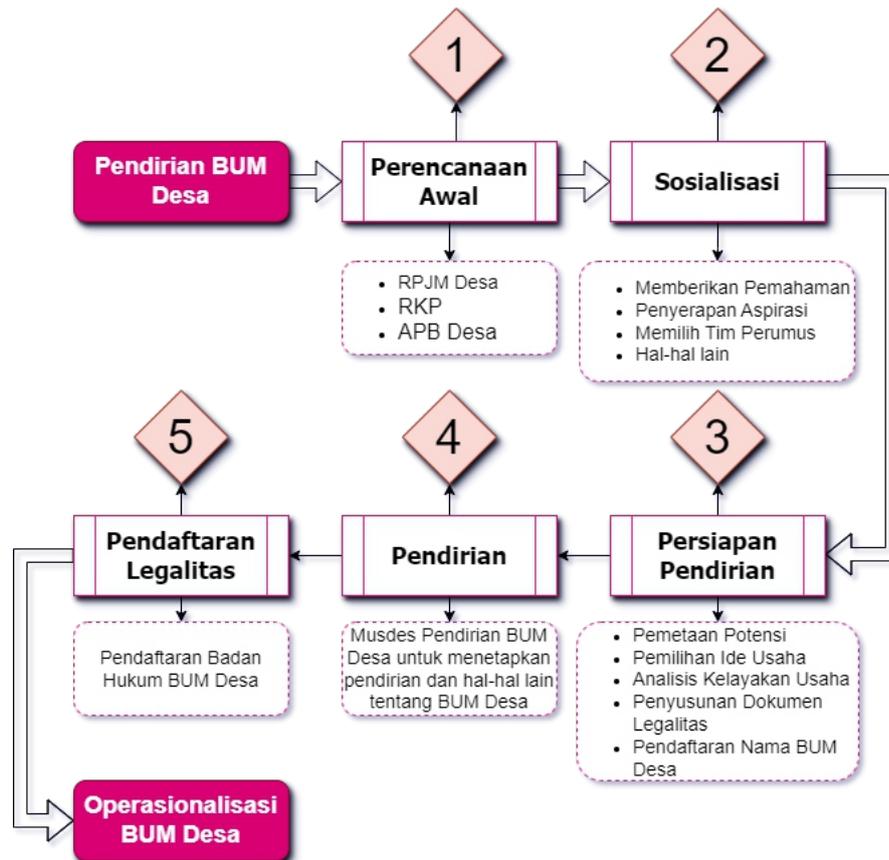
Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan akan diterapkan untuk mencapai tujuan, yakni membuka mindset para tokoh masyarakat akan pentingnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat Desa Tegalrejo dalam partisipasi pembangunan ekonomi desa. Melalui sosialisasi dan pelatihan, masyarakat diharapkan memahami pentingnya partisipasi aktif dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian juga diharapkan dapat mempercepat proses pembentukan BUMDes yang legal dan operasional. Dengan adanya BUMDes, Desa Tegalrejo dapat memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara lebih optimal, sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Adapun contoh materi yang akan disampaikan adalah tata cara pembentukan BUMDes seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Tampilan materi sosialisasi dan penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan dimana pelaksanaan sosialisasi akan tentang pentingnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa [11](Gambar 2). Materi yang disampaikan mencakup konsep *Community Driven Development* dan peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi desa. Pendampingan Pembentukan BUMDes, dimana tim pengabdian melakukan pendampingan intensif dalam proses pembentukan BUMDes, mulai dari sosialisasi massa, pembuatan aturan bersama, hingga legalitas BUMDes. Pendampingan ini mencakup penyusunan

dokumen AD/ART, Rencana Bisnis Strategis, dan pengajuan legalitas hukum akta notaris. Selain itu, keterampilan organisasi dan pengetahuan tentang pembentukan BUMDes di kalangan perangkat desa juga masih perlu ditingkatkan [14]. Dalam FGD juga dibahas setiap tahapan pendirian BUMDes, agar semua pemangku kepentingan di Desa memahami dan terlibat secara langsung dari tahap awal perencanaan sampai pada tahap operasionalisasi BUMDes. Materi dan tahapan juga disajikan secara terperinci kepada peserta FGD melalui materi sosialisasi secara elektronik dan cetak seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Tampilan materi sosialisasi dan penyuluhan

Setelah penyuluhan tentang peran penting masyarakat dalam partisipasi pembangunan, maka langkah selanjutnya adalah pendampingan pendirian BUMDes dengan secara intensif, TIM dan Mitra menyusun bersama dokumen-dokumen yang menjadi syarat Pendirian BUMDes. TIM akan mendampingi penyusunan dokumen tersebut, diantara; AD/ART, SK Pendirian dan Rencana Strategis Bisnis BUMDes. Dengan bantuan dari TIM maka diharapkan dapat membantu Mitra untuk segera mewujudkan lahirnya sebuah BUMDes di Desa Tegalrejo Sawit Boyolali, sebagai wadah partisipasi masyarakat dan peningkatan ekonomi Desa.

4. KESIMPULAN

Capaian kegiatan pengabdian ini sudah sesuai target dan tujuan yang ditetapkan. Permasalahan mitra terkait rendahnya keterlibatan masyarakat dan kesiapan perangkat aparatur

desa dalam membentuk Lembaga ekonomi desa melalui BUMDes, pemahaman tentang peran penting BUMDes sebagai Lembaga ekonomi yang dapat meningkatkan keswadayaan dan peningkatan kesejahteraan sudah diselesaikan dengan solusi melalui kegiatan sosialisasi dan FGD. Sedangkan permasalahan mitra belum memiliki *blueprint* atau *roadmap* rencana strategis BUMdes, Solusi yang ditawarkan adalah Pelatihan berupa pendampingan penyusunan Renstra Bisnis BUMdes dan Dokumen legalitas prasyarat pendirian BUMDes. Target pelaksanaan pengabdian adalah sebesar 80% tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan desa hadir mengikuti sosialisasi, FGD dan pelatihan penyusunan dokumen Renstra Bisnis dan Dokumen Legalitas BUMDes. Berdasarkan instrumen umpan balik/ penilaian peserta memahami peran penting kelembagaan BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan dan keswadayaan masyarakat desa, hal ini menjadi ukuran tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian ini.

Keberhasilan pendampingan rencana pendirian BUMDes di Desa Tegalrejo, Sawit, Boyolali, melalui pendekatan pemberdayaan partisipatif masyarakat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan ekonomi desa. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan pentingnya sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan intensif dalam proses rintisan pendirian BUMDes. Hasil yang diharapkan meliputi peningkatan kesadaran dan keterampilan masyarakat, serta terbentuknya BUMDes yang legal dan operasional. Keberhasilan program ini dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam mengembangkan ekonomi lokal melalui BUMDes.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Riset Grup Kearifan Lokal Fakultas Ekonomi dan Bisnis (RG. KL- FEB UNS) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM-UNS) yang telah memberikan dukungan pendanaan berdasarkan Kontrak Penugasan Pengabdian Masyarakat Dana Non APBN Universitas Sebelas Maret Tahun 2024, Nomor Kontrak. 195.1/UN27.22/PT.01.03/2024.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sutoro Eko, dkk. (2015). Modul Pelatihan Praturgas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- [2] Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of rural and development*, 5(1).
- [3] Jamhul Haer, Tri Mulyaningsih, Agustinus Suryantoro, Sarjiyanto. (2024). Studi Kelayakan Pendirian BUMDes Analisis Kelayakan Finansial dan Non Finansial Pendirian BUMDes. Penerbit Lakeisha.
- [4] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

- [5] Indarwati, I., KS, A., MP, P. D., & Sarjiyanto, S. E. (2022). Perempuan Dalam Pemberdayaan Dan Pembangunan Ekonomi. Penerbit Lakeisha.
- [6] Agung gunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1), 67-81.
- [7] Teguh, S. A. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- [8] Hajaroh, L., & Mulyono, S. (2014). Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota Semarang. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 3(2). <https://doi.org/10.15294/jnece.v3i2.3733>
- [9] Sarjiyanto. (2017). Peran Kelompok Masyarakat (Kube Lumbung Sinergi) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Desa Bulakan Sukoharjo Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 17 (1), 41-54.
- [10] Nurcahyo, D. W., et all. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Kejambon. *BANGUN DESA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (2), 129-135. [http://dx.doi.org/10.21927/jbd.2024.3\(2\).129-135](http://dx.doi.org/10.21927/jbd.2024.3(2).129-135)
- [11] Samsudin, S., 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Pustaka Setia
- [12] Fasli, D & Supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- [13] Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- [14] Karsidi, R. (2001). Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Pambudy dan A.K.Adhy (ed.): *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*. Bogor: Penerbit Pustaka Wirausaha Muda.
- [15] Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., (2014). Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 3(2), 21-30.